

Penguatan Manajemen Pendidikan Nasional untuk Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Mutu, Relevansi, Kesetaraan & Kepastian dalam Memperoleh Layanan Pendidikan di Indonesia

Teguh Triwiyanto

Dosen di Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang Jl. Semarang 5 Malang Email: teguhtri_um@yahoo.com

Abstrak: Tulisan ini bertujuan menguraikan beberapa persoalan manajemen pendidikan di Indonesia, mencari jalan keluar, dan mengkaji keberadaan Jurusan/Program Studi Administrasi/ Manajemen Pendidikan yang memang fokus pada persoalan-persoalan tersebut. Selain itu juga manajemen pendidikan nasional menghadapi tantangan yang cukup berat memerlukan tenaga-tenaga manajemen pendidikan yang profesional untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Perguruan Tinggi sebagai produsen tenaga-tenaga manajemen pendidikan memerlukan persiapan mencetak tenaga handal dengan membuat langkah-langkah strategis dibidang tenaga kependidikan ini. Sekaligus tulisan merupakan usaha membuat rangkuman artikel prosiding.

Kata kunci: Manajemen pendidikan, ketersediaan, mutu

Persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa aspek manajemen pendidikan nasional menghadapi tantangan yang cukup berat. Diperlukan tenaga-tenaga manajemen pendidikan yang profesional untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Perguruan Tinggi sebagai produsen tenaga-tenaga manajemen pendidikan memerlukan persiapan mencetak tenaga handal dengan membuat langkah-langkah strategis dibidang tenaga kependidikan ini.

Hendyat Soetopo (2012) menegaskan bahwa isu-isu sentral yang dihadapi bangsa Indonesia pada era dan pasca era reformasi mencakup pula globalisasi yang makin merasuk dan menerpa dengan keras terhadap seluruh aspek kehidupan, harus segera dijawab oleh bangsa Indonesia dengan mempersiapkan tenaga pembangunan yang tangguh dan berwawasan global. Abad 21 ditandai pula dengan berkembangnya teknologi informasi dengan hadirnya *hardware* dan *software* yang semakin variatif, canggih, dan efisien. Era revolusi informasi itu telah membawa implikasi terhadap dunia pendidikan dan pembelajaran. Salah satu wujud dampak revolusi informasi itu adalah semakin tidak terbatasnya kebutuhan belajar, maupun cara-cara memenuhi kebutuhan itu.

Sementara itu tantangan manajemen pendidikan oleh Agustinus Hermino S.Putra (2012) dijelaskan bahwa abad ke-21 ini UNESCO memaknai pendidikan dengan merumuskan visi dasar pendidikan yang sekaligus memuat pendidikan nilai-nilai dan merupakan sasaran hasil yang disarankan dicapai dalam praksis pendidikan. Dalam konteks program pendidikan tinggi di Indonesia, maka program pendidikan dilakukan untuk mendukung tujuan tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional, dan kesetaraan di semua provinsi.

Persoalan pendidikan dan manajemen pendidikan merupakan tantangan yang mau tidak mau perlu dihadapi dan dipecahkan. Kompetisi yang tidak sekedar nasional maupun regional melainkan global membutuhkan perangkat antisipasi jangka panjang. Pengalaman negara lain dapat dijadikan contoh.

Pengalaman pemerintah negara jiran Malaysia seperti yang diungkapkan oleh Sharil (2012) bahwa pembangunan pendidikan yang dirancang dan akan dilaksanakan adalah berdasarkan empat aspek. Aspek tersebut yaitu: meningkatkan akses kepada pendidikan, meningkatkan ekuiti dalam pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan kemampuan serta kesatu-paduan mengelola pendidikan.

Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Pendidikan

Perubahan manajemen pendidikan Indonesia sebagian besar didorong oleh semangat reformasi kekuasaan dan dilanjutkan dengan reformasi birokrasi yang terus berjalan sampai saat ini. Kebijakan manajemen pendidikan mengalami pergeseran, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Ashar (2012) menyebutkan bahwa pergeseran paradigma pengelolaan pendidikan dari sentralistik menuju manajemen desentralistik merupakan fenomena yang pernah dialami oleh sebagian besar negara-negara maju dalam mengatasi permasalahan mutu pendidikan yang dihadapinya. Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: *pertama*, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) sebagai otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, dan *kedua*, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pergeseran paradigma manajemen pendidikan nasional ternyata belum memberikan berkah terhadap perbaikan mutu pendidikan. Secara umum mutu pendidikan Indonesia dalam posisi global memang kurang begitu menggembirakan, lihat tabel 1 di bawah. Kondisi

tersebut memperlihatkan bahwa kinerja sektor pendidikan belum menggembirakan. Sektor pendidikan menjadi kunci, tanpa mengabaikan sektor lain, sebab pada sektor ini aktifitas pengembangan sumber daya manusia menjadi fokusnya. Artinya, melalui perbaikan pendidikan akan terangkat perbaikan sumber daya manusia Indonesia yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas manusia Indonesia.

Perbaikan mutu pendidikan Indonesia memang terus dilakukan. Manajemen pendidikan di Indonesia juga terus diperbaiki. Salah satu usaha pemerintah Indonesia memperbaiki mutu pendidikan yaitu dengan kebijakan Rintisan Sekolah Berstaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI). Kebijakan ini sudah berjalan 6 tahun dan saat ini sedang menjadi perdebatan di mahkamah konstitusi, apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Sunarni (2012) menilai dan berharap bahwa saat ini kebijakan RSBI/SBI masih menjadi perdebatan, ada pihak yang setuju dan tidak setuju. Karena ini merupakan hal yang baru, hendaknya tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, tetapi bersama-sama saling bekerja sama bahu membahu untuk mencari solusi yang tepat untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta.

Keberadaan RSBI/SBI di Indonesia memang seperti makan buah simalakama. Seandainya program ini dihentikan maka perbaikan mutu pendidikan yang mulai membaik bisa saja terancam. Sementara itu kalo ini kebijakan ini tetap dijalankan maka masih banyak masyarakat yang tidak memiliki modal ekonomi dan sosial kuat akan tersisih.

Kebijakan RSBI/SBI yang seperti makan buah simalakama tersebut akan bertambah persoalannya jika dihadapkan pada persoalan sekolah-sekolah miskin di Indonesia. Rambat Nur Sasongko (2012) menyebutkan faktor penyebab terjadinya sekolah miskin yang terdiri atas kekurangdukungan (1) konteks sekolah, (2) input sekolah, (3) kepedulian pemerintah, (4) kepemimpinan sekolah, (5) partisipasi guru, (6) partisipasi masyarakat, dan (7) kegiatan pembelajaran.

Selain peserta didik miskin dan sekolah miskin, masih terdapat lagi persoalan manajemen pendidikan berkebutuhan khusus. Dwiyatmi Sulasminah (2012) menyoroti persoalan manajemen pendidikan ini, terutama anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah individu yang memerlukan pendidikan yang dapat membantu mereka untuk dapat berperan aktif di masyarakat. Untuk dapat mencapai sebuah pendidikan yang berkualitas diperlukan manajemen pendidikan yang mampu memobilisasi segala sumber daya pendidikan. Melalui manajemen pendidikan cara-cara pengelolaan suatu lembaga pendidikan efisien dan efektif seperti pengelolaan keuangan, manajemen

pembelajaran, sumberdaya pendidikan, manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat.

Persoalan lain manajemen pendidikan nasional yang menghadang dan terkait dengan pendidikan yaitu jumlah penduduk yang besar tersebut belum menjadi berkah bagi kemajuan bangsa. Indonesia dengan jumlah penduduk 237,6 juta orang saat ini merupakan peringkat keempat diantara 237 negara yang disurvei. Bahkan data-data dari tabel 1 tersebut memperlihatkan keprihatinan besar bagi Indonesia, terutama sektor pendidikan. Kondisi pendidikan dasar dan indeks pembangunan pendidikan kita masih belum memuaskan dan memang pada gilirannya memperlihatkan bahwa HDI –nya sangat rendah yaitu 108 dari 169 negara yang disurvei. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa bangsa ini masih jauh dari rata-rata kualitas hidup bangsa lainnya. Lengkap sudah kondisi buruk ini terjadi, dari mulai bayi lahir terancam kematian, pendidikan dasar yang buruk, kesehatan yang tidak memadai, pengangguran yang besar, infrastruktur tidak memadai, resiko kegagalan negara mengancam, dan rentannya harapan hidup.

Tabel 1 Indonesia dalam Posisi Global

Indikator	Peringkat Indonesia	Negara yang Disurvei
Indeks daya saing/GCI (2010-2011)	44	139
Infrastruktur (2010-2011)	82	139
Kesehatan dan pendidikan dasar (2010-2011)	62	139
Angka kematian bayi (2010-2011)	97	139
Angka harapan hidup (2010-2011)	91	139
Kualitas pendidikan dasar (2010-2011)	55	139
Indeks pembangunan manusia/HDI (2010)	108	169
Indeks persepsi korupsi/CPI (2010)	110	178
Resiko kegagalan negara (2010)	61	178
Indeks pembangunan pendidikan/EDI (2010)	65	128
Jumlah penduduk 237,6 juta orang (2010)	4	237
PDB 1,033 triliun dollar AS (2010)	16	137
PDB per kapita 4.300 dollar AS (2010)	154	237
Pengangguran 7,1 persen (2010)	75	237

Sumber: Kompas 20 Mei 2011

Kementerian Pendidikan Nasional sesungguhnya dengan bagus sudah membuat peta permasalahan dan tantangan (tabel 2) yang musti dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia. Tentunya peta permasalahan dan tantangan tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang relevan. Padahal kondisi tata kelola kemendiknas saat ini yang kurang meyakinkan, membutuhkan kerja keras untuk dapat keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Terutama menjawab tantangan dunia pendidikan

yang akan terus menjadi penanda kemajuan zaman, maka pengelolaan pendidikan memerlukan pengkondisian yang matang.

Permasalahan dan tantangan di atas memperlihatkan bagaimana pengelolaan pendidikan membutuhkan pola penanganan sistematis. Indikator-indikator yang menghalangi kemajuan pendidikan ini tentu saja dapat dirubah dan dibuang jauh-jauh. Memberangus indikator-indikator negatif tersebut tentu membutuhkan tenaga luar biasa besar dari seluruh komponen bangsa. Sementara itu pendidikan menjadi kunci untuk melandasi perubahan ke arah lebih baik lagi. Pendidikan tentu saja masih dipercaya menjadi gerbong perbaikan kualitas bangsa ini. Perubahan suatu bangsa banyak ditentukan oleh sektor pendidikan, sudah banyak contoh suatu bangsa-negara maju karena pendidikannya.

Masalah akses dan mutu pendidikan memang masih menjadi persoalan utama pada sektor ini. Akses pendidikan memperlihatkan bahwa masih banyak provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum tuntas wajib belajar. Perbaikan mutu yang hampir menjadi program setiap menteri yang duduk di Kementarian Pendidikan Nasional, tapi sampai sekarang persoalan tersebut belum tuntas. Mutu pendidikan belum terangkat dan duduk sejajar dengan negara-negara lain, paling tidak semestinya di Asia Tenggara atau Asia.

Kualitas pendidikan yang buruk memang merupakan bagian paling gelap dan membahayakan suatu bangsa. Dari zaman orde baru, bahkan sampai sekarang, institusi pendidikan sering difungsikan sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikendaki. Maka, kebijakan pendidikan pun sering tersandera oleh kepentingan penguasa.

Bandingkan dengan kondisi terakhir China, dengan potensi penduduknya yang besar mampu menaikkan kesejahteraan warganya, saat ini cadangan devisa China terbesar di dunia, yakni mencapai rekor 3,0447 triliun dollar AS pada akhir maret 2011. China terus maju meninggalkan status sebagai negara paria menjadi salah satu pemilik mata uang kuat.

Kondisi pendidikan Indonesia yang masih berada di simpang jalan tersebut tentu saja bisa dilakukan perbaikan dan semestinya pemerintah tidak sedang tidur lelap sehingga tidak mengetahui sekelilingnya. Program dari Kementerian Pendidikan Nasional mestinya diarahkan untuk perbaikan pendidikan. Semangat dan harapan besar perlu perjuangan dan pengorbanan besar pula untuk mencapainya. Semangat dan harapan Kementerian Pendidikan Nasional berwujud dalam visi yang tentu saja juga merupakan semangat dan harapan konstitusi. Visi besar Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2025 adalah untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif (insan kamil/insan paripurna). Tentu saja yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif,

yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Visi jangka panjang tersebut kemudian oleh Kemendiknas diturunkan lagi menjadi visi tahun 2010 – 2014.

Tabel 2 Permasalahan & Tantangan Pendidikan Tahun 2011 - 2014

NO	MASALAH	TANTANGAN
Akses Pendidikan		
1	Masih banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum tuntas wajib belajar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya tampung SD 2. merevitalisasi pendidikan kesetaraan sebagai pendukung peningkatan akses pendidikan SD 3. Redistribusi guru
2	Kendala pendanaan pendidikan terutama untuk masyarakat miskin dan daerah-daerah tertinggal	Menjamin ketersediaan biaya bagi seluruh masyarakat untuk mendapat pendidikan SD
3	Masih ada budaya lokal yang belum mendukung kewajiban anak mendapat pendidikan SD	Mengedukasi masyarakat mengenai manfaat pendidikan SD
Mutu Pendidikan		
4	Masih banyaknya SD yang menyelenggarakan layanan pendidikan di bawah SPM dan SNP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SPM dan SNP 2. Mengembangkan kapasitas tenaga kependidikan dalam pengelolaan manajemen satuan pendidikan 3. Mengembangkan kapasitas pendidik dalam pengembangan sistem pembelajaran
5	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana pembelajaran berbasis TIK 2. Menyediakan akses internet 3. Menyediakan model pembelajaran berbasis TIK 4. Pengembangan kapasitas pendidik dalam pembelajaran berbasis TIK
6	Minimnya pembentukan karakter anak akhlak mulia dan kreatif dalam mengantisipasi dampak negatif perkembangan zaman serta globalisasi	Revitalisasi sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter
7	Masih banyaknya SD yang menyelenggarakan layanan pendidikan di bawah SPM dan SNP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SPM dan SNP 2. Mengembangkan kapasitas tenaga kependidikan dalam pengelolaan manajemen satuan pendidikan 3. Mengembangkan kapasitas pendidik dalam pengembangan sistem pembelajaran

Sumber: Direktorat Pembinaan SD Kemendiknas

Visi Kementerian Pendidikan Nasional adalah 2010 – 2014 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif, sungguh berat mewujudkannya dalam situasi pengelolaan pendidikan nasional dan layanan pendidikan yang carut marut seperti sekarang ini. Pengelolaan pendidikan nasional

semestinya mulai beranjak ke arah kematangan dalam bidang kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan, sumber daya manusia yang terlibat (pendidik dan tenaga kependidikan), peserta didik, dan partisipasi masyarakat, tetapi pada kenyataannya persoalan-persoalan terus menderanya. Bukan sekedar menjadikan pengelolaan pendidikan menjadi bertambah baik, malah tarik ulur kepentingan sering menjadikan urusan pendidikan terbengkalai. Ujung-ujungnya layanan pendidikan nasional yang semestinya mampu dinikmati merata setiap masyarakat sampai hari ini masih banyak menyisakan persoalan.

Sementara itu misi Kementerian Pendidikan Nasional 2010 – 2014 juga memperlihatkan bahwa memang terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan dan layanan pendidikan nasional. Isi yang dicanangkan merupakan wujud masih banyak kelemahan yang mesti diperbaiki kalau tidak mau pendidikan nasional semakin tenggelam. Misi itu sendiri yaitu: meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Mutu layanan pendidikan yang harus diperbaiki oleh pemerintah memang berat. Kalau memang data yang ditampilkan oleh pemerintah benar, maka hampir 50 persen sekolah disemua jenjang belum memenuhi standar pendidikan minimal. Artinya, masih banyak sekolah yang harus diperbaiki mutu layanan pendidikannya. Padahal beban tersebut harus ditambah dengan sekolah yang masih berada di standar minimal, yang tentu saja belum optimal mutu layanan pendidikannya.

Tabel 3 Rekapitulasi Data Sekolah Berdasarkan Kategori Sekolah

	<SPM		SPM		SSN		RSBI		SBI		TOTAL
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jml	%	
SD	65.869	44,84	75.965	51,71	4.831	3,29	239	0,16	0	0	146.904
SMP	8.892	26,01	15.226	44,54	9.711	28,41	356	1,04	0	0	34.185
SMA	3.990	35,30	4.210	37,24	2.745	24,28	359	3,18	0	0	11.304
SMK	2.493	27,20	3.143	34,30	3.177	34,67	351	3,83	0	0	9.164
TOTAL	81.244	40,31	98.544	48,89	20.464	10,15	1.305	0,65	0	0	201.557

Sumber: Direktorat Pembinaan SD Kemendiknas

Tabel di atas memperlihatkan jangkauan pengelolaan yang luas dan memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Pengelolaan pendidikan adalah suatu proses penataan kelembagaan pendidikan dengan melibatkan sumber-sumber potensial, baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat non manusia dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif

dan efisien. Hal yang tampak dari misi dan kebijakan yang lahir dari Kementerian Pendidikan Nasional mengandung titik lemah pada pengelolaan dan layanan pendidikan nasional. Misi dan kebijakan tersebut juga memperlihatkan bahwa sampai hari ini layanan pendidikan yang minim tersedia, jangkauan layanan pendidikan yang kurang merata, belum terwujudnya kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan jaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang rendah.

Tentu saja persoalan-persoalan tersebut dapat diatasi dan diperbaiki, tapi melalui kerja keras dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang memadai. Rahmania Utari (2012) memberikan alternatif terhadap persoalan manajemen pendidikan, terutama di sekolah melalui *twinning program*. *Twinning program* dapat diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia agar standar nasional pendidikan atau standar yang lebih unggul terpenuhi. Dalam pemilihan partner dan prosesnya perlu memperhatikan berbagai aspek, baik dari sisi mitra sekolah, desain kemitraan, pihak-pihak yang terlibat, program/aktivitas yang dilakukan, parameter, dan monitoring. Dengan disparitas mutu pendidikan antarpropinsi atau /kabupaten/kota, kiranya *twinning program* bisa menjadi alternatif untuk mengakselerasi pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.

Manajemen Kurikulum & Pembelajaran

Ulfatin dan Arifin (2004:2) menyatakan bahwa kebermaknaan pembelajaran sangat ditentukan oleh pendidik selain sumber belajar pendukung lain. Oleh sebab pendidik menjadi kunci dalam kesuksesan pembelajaran, maka pendidik harus mampu merancang dan mengembangkan materi pembelajaran secara proporsional dan akomodatif untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Perancangan pembelajaran yang dilakukan secara proporsional dan akomodatif akan membuat iklim pembelajaran menjadi aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Pendulum kurikulum dan pembelajaran di Indonesia bergerak antara keniscayaan terhadap budaya dan tata nilai lokal dengan budaya dan tata nilai universal. Budaya dan tata nilai universal ini sering kemudian sering diterjemahkan sebagai internasionalisasi kurikulum dan pembelajaran. Maka selain kurikulum dan pembelajaran berbasis pada budaya dan tata nilai lokal, muatan internasional juga tidak kalah kuat didesakkan. Lahirnya sekolah atau rintisan bertaraf internasional (SBI/RSBI) merupakan contoh gamblang bagaimana pendulum itu bergerak pada satu sisi. Sementara itu sisi lainnya ramai-ramai masyarakat memuntut adanya upaya pendidikan karakter yang massif menginternalisasi peserta didik.

Ambivalensi sikap pemerintah terhadap kurikulum dan pembelajaran menjadikan bingung pada level sekolah-sekolah. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas mengamanatkan bahwa Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ambivalensi pemerintah tampak pada sistem evaluasi pendidikan (ujian nasional) yang sebenarnya mengabaikan semangat pengembangan kurikulum berdasarkan undang-undang sistem pendidikan nasional.

Salah satu persoalan kurikulum yang terus menjadi kegelisahan bersama yaitu mengenai pengelolaan pendidikan nilai, terutama nilai-nilai kebangsaan. Oleh peserta Kongres Pancasila di Universitas Airlangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai sandaran pengelolaan pendidikan dinilai menjadi salah satu penghambat utama dalam upaya pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat (Kompas, 4/06/2011). Pembudayaan nilai-nilai dalam pendidikan biasanya masuk dalam layanan kurikulum dan pembelajaran. Layanan kurikulum dan pembelajaran merupakan salah satu komponen layanan pendidikan yang sangat strategis karena merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai “jantung-nya” dari proses pembelajaran di sekolah untuk memberdayakan potensi peserta didik.

Negara tetangga yaitu Thailand (Ammar Navy: 2012) melakukan reformasi pendidikan menjadi agenda resmi semenjak tahun 1999, hampir bersamaan dengan Indonesia. Tetapi Thailand sudah maju selangkah dari Indonesia. Di beberapa bagian Indonesia masih terdapat kesulitan mengakses pendidikan sehingga sebagian masyarakat tidak mampu menyelesaikan wajib belajar.

Tapi pemerintah tentu saja tidak tinggal diam terhadap kesulitan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan berusaha menuntaskan wajib belajar. Nurul Ulfatin (2012) menyebutkan penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia beberapa tahun yang lalu ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan, program, dan kegiatan yang konkrit. Satu kegiatan konkrit dan dinilai sangat efektif adalah didirikannya SMP Satu Atap di sejumlah daerah pedesaan dan daerah terpencil.

SMP Satu Atap memiliki karakteristik yang sangat khusus yang berbeda dengan SMP reguler. Untuk itu, manajemen yang diterapkan di SMP Satu Atap seharusnya dirancang secara khusus. Kekhususan yang diperlukan antara lain layanan kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal yang diperlukan di SMP Satu Atap adalah kurikulum atau program yang membelajarkan siswa untuk mencapai kompetensi *pra-vocational skills* dengan jenis pengalaman belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa dan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil.

Manajemen Pendidik /Tenaga Kependidikan & Supervisi

Berbeda dengan pengelolaan kurikulum di atas, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pun bukan tanpa masalah. Salah satu masalah yang muncul yaitu nasib guru sekolah-sekolah swasta di sejumlah daerah masih terabaikan. Banyak guru yang mendapat gaji di bawah upah minimum kabupaten. Gaji mereka antara Rp 75.000 sampai dengan Rp 200.000 per bulan, sementara upah minimum regional atau kabupaten berkisar Rp 800.000 sampai dengan Rp 1.200.000. Padahal, guru-guru tersebut ikut berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Kompas, Rabu 4 Mei 2011). Jauhnya jarak antara gaji dengan UMR memperlihatkan betapa penghargaan kepada para pendidik (guru) belum dihargai semestinya. Program sertifikasi dari pemerintah belum mampu menyentuh banyak.

Sementara itu keterampilan dasar guru sampai sekarang masih belum merata dikuasai sehingga mutu pendidikannya pun tidak seimbang antar daerah. Maisyaroh dan Suryani (2004: 4) mengatakan bahwa dalam sistem pembelajaran, pendidik semestinya mengetrapkan ketrampilan dasar mengajar dengan derajat ketepatan yang bervariasi. Untuk meningkatkan ketrampilan dasar ini maka pendidik perlu berlatih secara terus menerus agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif & efisien. Beberapa ketrampilan mengajar yang perlu dikuasai pendidik antara lain: ketrampilan membuka dan menutup pelajaran, ketrampilan menjelaskan, ketrampilan bertanya, ketrampilan memberi penguatan,

ketrampilan variasi mengajar, dan ketrampilan mengelola kelas. Ditengarai pelatihan-pelatihan yang diikuti guru kurang mampu membangkitkan profesionalisasinya.

Sultoni (2012) menyebutkan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu pelatihan adalah kemampuan peserta memanggil kembali (mengingat) materi yang telah disajikan. Berdasarkan model pemrosesan informasi menurut teori belajar kognitif terdapat beberapa cara yang dapat digunakan agar peserta mampu memasukkan materi pelatihan ke dalam memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Cara tersebut adalah *attention*, *perception*, *rehearsal*, *encoding*, *retrieval*, dan *meta cognition*.

Selain kegiatan pelatihan yang mungkin dilakukan oleh guru, pembinaan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selama ini yang melakukan pembinaan kepada guru yaitu kepala sekolah dan pengawas.

Kepala sekolah sebagai orang yang melakukan supervisi semestinya memiliki kepribadian yang mumpuni. R. Bambang Sumarsono (2012) menegaskan bahwa kepribadian dari seorang kepala sekolah yang baik adalah sebagai berikut: (1) rendah hati dan sederhana, (2) suka menolong, (3) Sabar dan memiliki kestabilan emosi, (4) percaya kepada diri sendiri, (5) Jujur, adil dan dapat dipercaya, dan (6) memiliki keahlian dalam jabatan. Di samping itu kepala sekolah harus memiliki kompetensi: (1) kepribadian, (2) manajerial, (3) wirausaha, (4) supervisi, dan (5) sosial.

Selain kepala sekolah, pengawas sekolah juga memiliki peran strategis untuk terus memperbaiki mutu pendidikan. Optimalisasi tugas pengawas oleh Hamzah B. Uno (2012) ditegaskan melalui beberapa langkah: (1) Mekanisme perekrutan pengawas pendidikan agar diperoleh pengawas yang profesional, sebaiknya dilakukan bersamaan dengan perekrutan guru baru. Mereka yang direkrut diberikan tes kompetensi pengawas yang hasilnya dapat merekomendasikan tiga kelompok pengawas yakni (a) pengawas yang direkrut langsung bekerja, (b) pengawas yang direkrut perlu pendidikan 3 bulan, dan (c) pengawas yang direkrut perlu pendidikan 1 bulan; (2) Perekrutan pengawas dengan mengalihfungsikan kepala sekolah atau guru jadi pengawas dipandang kurang efektif; dan (3) Kelembagaan pengawas pendidikan yang dianggap menjadi lembaga atau badan yang independent dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dapat dilakukan melalui pembentukan badan pengawas pendidikan tingkat provinsi dan badan pengawas pendidikan di tingkat kabupaten/kota, yang kedudukannya setingkat kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kepala dinas tingkat kabupaten/kota.

Manajemen Peserta Didik

Siswa mempunyai sebutan-sebutan lain seperti murid, subjek didik, anak didik, pembelajar, dan sebagainya. Apapun istilahnya, yang jelas siswa adalah mereka yang sedang mengikuti program pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Karena itu layanan kesiswaan merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Berarti, layanan kesiswaan/manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap siswa mulai dari masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Yang diatur adalah segi-segi yang berkenaan dengan siswa secara langsung dan tidak langsung (Imron dan Wiyono, 2004:3).

Salah satu persoalan manajemen peserta didik yaitu seperti yang disebutkan oleh Dwiyami Sulasminah (2012) bahwa berdasarkan Undang-undang sistem pendidikan nasional di atas, maka sering terjadi pengkotak-kotakan pendidikan bagi anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus sering termarginalkan, mereka kurang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di masyarakat, bahkan terjadi mereka di tolak dari satu sekolah ke sekolah lainnya dengan alasan tidak ada guru yang dapat menangani mereka. Akhirnya mereka tidak mendapatkan hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Sistem pendidikan di negara Indonesia kurang mengakomodasi keberagaman yang ada seperti agama, suku, bahkan kemampuan. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, BAB II pasal 2 menyebutkan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan salah satunya yaitu standar sarana dan prasarana. Ayat dari pasal 24 PP tersebut menyatakan; (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat

beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

A.Mappincara (2012) menyatakan untuk mendukung pengembangan kreativitas baik bagi guru maupun para siswa di sekolah perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Di Indonesia, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana / fasilitas pembelajaran antar sekolah sangat bervariasi. Biasanya sekolah-sekolah yang berada di kota, dan dijadikan sekolah favorit bagi para peserta didiknya, akan memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran lebih memadai. Dalam hal pengadaan sarana, ada kecenderungan bahwa sekolah-sekolah yang memiliki pimpinan (kepala sekolah) yang “lincah dan gesit” serta mempunyai hubungan yang baik dengan penentu kebijakan pemberian bantuan saranalah yang akan banyak mendapatkan fasilitas pembelajaran, sedangkan untuk sekolah-sekolah dengan pimpinan yang kurang “lincah dan gesit” serta mempunyai hubungan yang belum baik dengan penentu kebijakan pemberian bantuan sarana, hanya akan mendapatkan sedikit atau bahkan tidak mendapatkan bantuan kelengkapan sarana prasarana/fasilitas pembelajaran.

Selain itu A.Mappincara (2012) juga menegaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun peserta didik untuk berada di sekolah. Selain itu dengan manajemen sarana dan prasarana yang baik ketersediaan alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai baik dilihat dari kualitas, kuantitas, dan relevan dengan yang dibutuhkan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pembelajaran.

Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen keuangan/pembiayaan pendidikan merupakan layanan terhadap fungsi-fungsi keuangan/pembiayaan. Fungsi keuangan didalamnya memuat pemerolehan/sumber-sumber dana pendidikan dan bagaimana mengalokasikannya. Institusi pendidikan sebagai organisasi sektor publik tidak bisa mengabaikan layanan keuangan/pembiayaan pendidikan ini.

Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam pertimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Manajemen Partisipasi Masyarakat

Layanan partisipasi masyarakat atau sering juga disebut hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat memperlihatkan upaya bersama-sama membangun pendidikan. Maisyaroh (2004:118) mengatakan bahwa hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan dan praktik pendidikan dan pada akhirnya bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan. Manajemen hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat adalah proses mengelola komunikasi tersebut mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatannya.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa layanan partisipasi masyarakat bertujuan untuk membangun lembaga pendidikan. Wujud dari layanan tersebut lebih menekankan pada mengelola komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Media-media atau wadah-wadah komunikasi tersebut sebenarnya sudah ada, misalnya melalui persatuan orang tua peserta didik, komite atau dewan sekolah, dewan pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bidang pendidikan.

Arifin (2012) menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan, sekolah perlu memberdayakan masyarakat dengan mengajak bekerjasama stakeholder dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Kebersamaan merupakan potensi yang sangat vital untuk membangun masyarakat untuk menciptakan demokrasi pendidikan. Disamping itu sekolah

bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan sehingga memberikan keputusan dan memiliki kebenaran untuk dikoreksi oleh stakeholder.

Setya Raharja (2012) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan maupun penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat penting dan mendesak diintensifkan. Salah satu sasaran partisipasi mereka dapat diprioritaskan pada pengembangan organisasi sekolah sehat. Organisasi sekolah yang sehat akan mendukung terwujudnya iklim sekolah yang sehat dan kondusif, yang pada gilirannya terwujud pula sekolah efektif. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu diperkuat, namun perlu memperhatikan praktik-praktik partisipasi yang keliru, memperhatikan dimensi organisasi sekolah sehat yang ditargetkan, serta memperhatikan level partisipasi yang akan dikembangkan.

Potret Manajemen Pendidikan di Berbagai Jenjang

Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), *raudatul athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Upaya penyediaan layanan pendidikan oleh pemerintah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memperlihatkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang ini meningkat dari 39,09% pada tahun 2004 menjadi 50,62% pada tahun 2008. Tahun 2009 terjadi peningkatan APK menjadi 53,90%. Disparitas APK pada jenjang PAUD antarwilayah terjadi penurunan yaitu dari 6,0% pada tahun 2004 menjadi 3,61% pada tahun 2008 dan turun menjadi 3% pada tahun 2009.

Persoalan yang menjadi tantangan bagi layanan PAUD yang optimal memang tidak sedikit. Sejalan dengan Kemendiknas (2010:24), diantara persoalan PAUD yang ada yaitu: (1) terbatasnya penyediaan pendidik PAUD berkompoten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan guru TK/TKLB berkompoten dan penyediaan tutor PAUD nonformal berkompoten; (2) kurang tersedianya manajemen PAUD berkompoten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan

pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi; (3) minimnya penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu PAUD, serta keterlaksanaan akreditasi PAUD; (4) terbatasnya penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran TK/TKLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, dan kabupaten/kota; dan (5) terbatasnya penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD Nonformal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, dan kabupaten/kota.

Terbatasnya penyediaan pendidik PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan guru TK/TKLB berkompeten dan penyediaan tutor PAUD nonformal berkompeten disebabkan oleh terbatasnya akses pemerintah pusat terhadap pengelolaan tenaga pendidik ini. Kabupaten/kota yang memiliki kewenangan dalam distribusi pendidik, hal sebaliknya tidak setiap kabupaten/kota mempunyai stok pendidik yang memadai, belum bicara kualitas. Pemerintah pusat yang sesungguhnya mengetahui kondisi secara pasti kebutuhan pendidik di setiap kabupaten/kota, tapi sayangnya tidak mampu melakukan mutasi antar daerah.

Jika kondisi ini terus berlarut-larut, maka pemerintah pusat yang sudah tahu duduk persoalannya – tidak meratanya distribusi pendidik – tidak akan bisa berbuat banyak. Perlu ada perbaikan tata kelola pendidik ini, terutama terkait dengan mutasi dan distribusi. Semestinya pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan itu, sebab jika dikelola oleh kabupaten/kota sifatnya hanya lokal semata-mata dan sulit melakukan mutasi atau distribusi pendidik antara kabupaten/kota. Berbeda misalnya pemerintah pusat memiliki kendali, tetapi tentu saja pemerintah pusat harus memiliki data base dan peta kebutuhan pendidik di setiap kabupaten/kota.

Seperti diungkapkan di atas, persoalan yang tidak kalah penting yaitu kurang tersedianya manajemen PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi. Imron Arifin (2012) menekankan penting keberadaan kepala satuan pendidikan yang mumpuni.

Sesungguhnya persoalan tersebut di atas dapat diselesaikan dengan keterlibatan pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama-sama membuat pola-pola dan kebijakan. Tentunya pola dan kebijakan tersebut yang mampu mengakomodasi setiap kelebihan dan kekurangan setiap kabupaten/kota. Artinya, pemerintah pusat harusnya mampu memediasi setiap kelebihan dan kekurangan setiap kabupaten/kota dengan peraturan-peraturan yang mengikat semua.

Salah satu hal yang sangat penting ditekankan oleh Imron Arifin (2012) bahwa membentuk bangsa yang berkarakter tentu efektif bilamana diberikan pada konteks pendidikan, baik di sekolah, kultur sekolah, maupun komunitas luas, demikian pula dengan kepala sekolah yang mendasarkan kepemimpinannya pada basis moral-spiritual. Akan mampu menumbuhkan dalam kepemimpinannya kesalehan individu, sehingga pemimpin akan menjadi pribadi yang saleh yang senantiasa menunjukkan sinergitas antara *dzikir* (hati), *fikir* (intelektual), dan *fi'il* (perilaku).

Manajemen Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pengertian dalam UU Sisdiknas tersebut menjadikan pendidikan menengah bawah (SMP/MTs) sebagai – istilah Romo Drost (2000:7) – pengajaran wajib 9 tahun.

Saat ini pada level nasional untuk pendidikan dasar sudah mencapai APM 95,23 % namun demikian belum merata di seluruh provinsi. 14 Provinsi masih berada di bawah rata-rata nasional yang sebagian besar berada di Indonesia bagian Tengah dan Timur (8 Provinsi) Pada level kabupaten/kota hanya dua provinsi yang seluruh kab/kotanya telah memiliki APM di atas rata-rata nasional. Masih ada 165 kab/kota yang memiliki APM di bawah rata-rata nasional. dari 165 kab/kota tersebut 60 merupakan kabupaten tertinggal (saat ini ada 149 daerah tertinggal).

Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan rasio anak yang bersekolah pada kelompok usia itu dengan jumlah penduduk usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur seberapa besar anak usia sekolah yang bersekolah. Kelemahan dari penghitungan APM ini yaitu bahwa saat ini terdapat kecenderungan bahwa APM menurun, hal ini dikarenakan banyak anak masuk sekolah lebih dini (kelas 1 SD/MI banyak yang kurang dari 7 tahun) (DBE1 USAID, 2011: 12).

Data dari Kemendiknas (2010:21) menunjukkan bahwa pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A terjadi peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dari 112,5% pada tahun 2004 menjadi 116,56% pada tahun 2008 dan diperkirakan menjadi 116,95% pada tahun 2009. Seiring dengan itu angka partisipasi murni (APM) naik dari 94,12% pada tahun 2004 menjadi 95,14% pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 95,40% pada tahun 2009.

Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, APK meningkat dari 81,22% pada tahun 2004 menjadi 96,18% pada tahun 2008 dan menjadi 98,00% pada tahun 2009.

APK menggambarkan rasio semua anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan kelompok usia pada jenjang yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur seberapa besar anak bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa mempertimbangkan usia anak, apakah ada dalam kelompok usia sekolah atau di luar kelompok usia sekolah (DBE1 USAID, 2011: 12).

Sementara itu dari hasil UASBN dapat digambarkan variasi mutu pendidikan sangat bervariasi antar provinsi. Meskipun tidak ada yang berada dibawah angka kelulusan (4,5) namun 6 provinsi memiliki rata-rata nilai UASBN dibawah 6. seluruh provinsi tersebut berada di wilayah Indonesia tengah dan Timur. Ditinjau dari rata-rata nilai per mata pelajaran masalah dapat dipetakan kendala utama adalah pada mata pelajaran Matematika di mana 15 provinsi memiliki rata-rata nilai matematika.

Permasalahan dan tantangan di sektor pendidikan sebenarnya sudah di tanggapi serius oleh kementerian. Tujuan dan sasaran strategis sudah dibuat oleh kementerian, tinggal dilaksanakan dengan baik. Tabel berikut menyajikan tujuan dan sasaran tersebut.

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekolah Dasar 2010-2014

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
1	Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan SD bermutu dan berkesetaraan di semua Provinsi, Kabupaten dan Kota	APM SD/MI/Paket A Nasional Mencapai 96%
		APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 99,9%
		Sekurang-kurangnya 15% SD/SDLB/MI terakreditasi minimal B
		Meningkatnya Angka Melanjutkan minimal 95% dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1%
		Seluruh satuan pendidikan SD/SDLB/MI menerapkan pembelajaran yang membangun karakter
2	Tersedianya sistem tatakelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan Prima Pendidikan Nasional	Seluruh Kabupaten dan Kota melaksanakan SPM Pendidikan Dasar.

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 –2014

Manajemen Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Persoalan pendidikan menengah berikut dikutip dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 – 2014. APK SMA/SMK/MA/SMAB/Paket C mengalami peningkatan, yaitu 49,01% pada tahun 2004 menjadi 64,28% pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 68,20% pada tahun 2009. Disparitas APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C antara kabupaten dan kota menurun dari 33,1% pada tahun 2004 menjadi 30% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 29,2% pada tahun 2009. Sementara itu, rerata nilai Ujian Nasional pada jenjang ini menunjukkan peningkatan, dari 5,31 pada tahun 2004 menjadi 7,17 pada tahun 2008.

Program pengembangan sekolah/madrasah bertaraf internasional (SBI) pada jenjang pendidikan menengah telah menunjukkan hasil. Terlihat peningkatan jumlah sekolah bertaraf internasional dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 telah terbentuk 259 SMA dan 300 SMK berstandar internasional atau dirintis berstandar internasional. Hasil yang sama juga terjadi pada program sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal. Hingga tahun 2008 telah dikembangkan sebanyak 100 SMA dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal. Rasio jumlah siswa SMK:SMA dari tahun ke tahun juga terus meningkat dari 30:70 pada tahun 2004 menjadi 49:51 menurut perhitungan sementara pada akhir bulan September 2009. Rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan menengah juga meningkat dari 93,8% pada tahun 2004 menjadi 95,6% pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 95,9% pada tahun 2009.

SBI sendiri bukan tanpa masalah, program ini menuai kritik dari beberapa kalangan. Triwiyanto dan Sobri (2010: 12) menyatakan keberadaan kebijakan SBI memang selama ini tidak serta merta berjalan mulus, terdapat banyak kritik terhadapnya. Siregar (Kompas, 8/4/2009) menyoroti bahwa pelaksanaan SBI menjadikan kurikulum dan materi pelajaran terkesan tidak terkontrol oleh pemerintah. Selain memakai kurikulum nasional, sekolah-sekolah nasional tersebut juga mengadopsi kurikulum internasional. Bahkan, pengajarnya lebih banyak warga negara asing, termasuk penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Selain itu berupa munculnya dampak panjang sosial budaya dan nasionalisme

pada anak-anak Indonesia. Para siswa begitu minim pengetahuan sosial dan budaya Indonesia, nilai-nilai historis dan nasionalisme, serta sikap individualisme yang begitu tinggi. Kurikulum sekolah menyiapkan mereka sebagai warga dunia atau sebagai komunitas internasional, sebaliknya nilai-nilai keIndonesiaan tidak ditanamkan. Martono (2010:114) mengatakan bahwa SBI: sekolah *bertarif* internasional mengancam potensi lokal.

Dampak sosial budaya dan nasionalisme seperti diungkapkan di atas bukan akan terjadi sekarang, tetapi berupa dampak panjang. Karena berupa dampak panjang maka menjadi sulit sekali memprediksi apa yang akan terjadi pada peserta didik sekian puluh tahun ke depan, terutama yang belajar di kelas-kelas SBI sekarang. Ketakutan beberapa kalangan tersebut cukup beralasan, kemungkinan anak-anak akan tercerabut dari akar sosial dan budaya Indonesia. Sisi buruk dari keberadaan SBI inilah yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

Secara umum persoalan-persoalan pendidikan pada jenjang menengah ini tampak pada beberapa aspek yang menonjol. Aspek-aspek itu antara lain: (1) Penyediaan pendidik pendidikan menengah berkompoten yang belum merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan guru SMA/SMLB/SMK serta tutor Paket C berkompoten; (2) Penyediaan manajemen SMA/SMLB/SMK serta Paket C berkompoten yang belum merata merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi; (3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan menengah, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan menengah yang masih lemah; (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA berkualitas yang belum merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; (5) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK berkualitas yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang belum merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; (6) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK berkualitas yang belum merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota; dan (7) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket C berkualitas yang belum merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Nelfia dan Lusi Susanti (2012) menyatakan bahwa berkaitan dengan dugaan terhadap salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan tersebut, pemerintah mempunyai program yang memiliki pemikiran kearah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan secara luas sesuai dengan potensi dan

keterbatasan yang dimiliki sekolah tersebut. Program ini dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) atau *School Based Manajement* (SBM).

Manajemen Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Pada jenjang pendidikan tinggi terjadi peningkatan APK dari 14,62% pada tahun 2004 menjadi 17,75% pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 18,50% pada tahun 2009. Capaian peningkatan APK pendidikan tinggi vokasi adalah dari 1,47% pada tahun 2004 menjadi 3,8% pada tahun 2008. Untuk tahun 2008 sertifikat kompetensi pendidikan tinggi mencapai 193,206 lembar, sedangkan pada tahun 2007 mencapai 144,292 lembar. Perkembangan persentase dosen berkualifikasi S2/S3 pada perguruan tinggi negeri sejak tahun 2004 sampai 2008 mengalami fluktuasi. Perkiraan capaian tahun 2009 mencapai 70,43%.

Sertifikasi dosen baru dilaksanakan pada tahun 2008 dan pencapaiannya baru sebesar 7,4%. Jumlah perguruan tinggi pada peringkat dunia, perkembangannya mengalami fluktuasi dari tahun 2004-2008. Jumlah paten yang berhasil diraih perguruan tinggi senantiasa meningkat dari hanya 5 paten pada tahun 2004 menjadi 43 paten pada tahun 2008. Publikasi internasional oleh dosen perguruan tinggi mengalami peningkatan. Dari tahun 2003 ke tahun 2004, peningkatan jumlah publikasinya adalah sebesar 5%, sedangkan dari tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi peningkatan jumlah publikasi internasional sebesar 43%. Statistik tentang paten dan publikasi internasional ini menunjukkan bahwa iklim penelitian yang berkualitas semakin membaik. Rasio gender pada jenjang pendidikan tinggi juga naik dari 90,1% pada tahun 2004 menjadi 102,3% pada tahun 2008.

Prestasi mahasiswa Indonesia di ajang internasional menunjukkan hasil yang fluktuatif. Jumlah medali emas yang diperoleh pada tahun 2006 adalah 27 buah, pada tahun 2007 adalah 0 dan pada tahun 2008 diperoleh 29 medali emas.

Secara umum persoalan-persoalan pendidikan di perguruan tinggi ini tampak pada beberapa aspek yang menonjol. Aspek-aspek itu antara lain: persoalan (1) belum optimalnya

penyediaan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing; (2) upaya yang masih rendah dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel; (3) keterbatasan penyediaan data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan tinggi; (4) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran perguruan tinggi berkualitas dan berdaya saing yang belum merata di seluruh provinsi; (5) masih minimnya upaya peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, berdaya saing internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; dan (6) penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan perguruan tinggi berkualitas yang belum merata di seluruh provinsi.

Agustinus Hermino (2012) memiliki harapan bahwa pendidikan tinggi semestinya tetap memberikan sumbangannya bagi masyarakat, karena pendidikan tinggi dijadikan tempat di dalam masyarakat yang dianggap mampu dan memiliki kemampuan intelektual yang lebih dibandingkan bagian lain dari masyarakat yang lebih bertujuan untuk menggunakan pengetahuan secara praktis. Sebagai sumber pengetahuan diharapkan pendidikan tinggi mampu membantu masyarakat melihat secara lebih luas dan mendalam dari berbagai fenomena yang hadir di dalam kehidupan masyarakat. Inilah salah satu sumbangan Pendidikan Tinggi yaitu membantu masyarakat untuk berefleksi, sehingga masyarakat tidak hanya hanyut pada arus jaman, tetapi juga mampu mengambil jark dan membuat keputusan.

Tantangan Jurusan Administrasi/Manajemen Pendidikan

Pengetahuan tentang Manajemen Pendidikan sangat penting dipahami dan dikuasai oleh para pengembang ilmu manajemen pendidikan maupun manajer pendidikan. pengetahuan tersebut bersumber dari teori organisasi dan manajemen serta konsep pendidikan (Mada Sutapa dan Dwi Esti Andriani: 2012). Bercermin dari hal tersebut, maka untuk melihat tantatangan jurusan administrasi/manajemen pendidikan dibutuhkan pengetahuan mengenai manajemen pendidikan.

Pengetahuan mengenai manajemen pendidikan sudah dipaparkan di awal tulisan ini. Perbaikan pendidikan, terutama manajemen pendidikan menjadi tuntutan yang mendesak. Hendyat Soetopo (2012) menyatakan bahwa perlu adanya solusi dengan *redesign* (perancangan ulang) secara sistemik pendidikan nasional kita dengan menjabarkan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (yang sudah lumayan bagus) itu ke dalam pedoman-pedoman umum dan pedoman-pedoman aplikatif pendidikan.

Mada Sutapa dan Dwi Esti Andriani (2012) menyatakan bahwa pengembangan Manajemen Pendidikan dibutuhkan untuk menghasilkan teori/konsep yang dibutuhkan para manajer pendidikan sebagai *practical guidance* dalam mengelola pendidikan. Dalam hal ini, Hoy dan Miskel (2001) mengatakan bahwa *research and theory building (of educational administration-pen) can serve as useful frames of reference for practitioners as they engage in real-world problem solving*. Fungsi teori bagi para administrator pendidikan dikemukakan oleh Lunenberg dan Orstein (2004) yang mengacu pada pendapat Deobold Van Dalen, yaitu 1) mengidentifikasi fenomena yang relevan; 2) mengklasifikasikan fenomena; 3) memformulasikan konstruk; 4) merangkum (*summarize*) fenomena; 5) memprediksi fenomena; dan 6) memunculkan penelitian yang dibutuhkan. Jadi, berlandaskan pada bangunan teori/konsep Manajemen Pendidikan, setiap tindakan manajerial yang dilakukan oleh para manajer pendidikan akan dapat dideskripsikan, dijelaskan, bahkan diprediksikan kemungkinan-kemungkinan akibatnya. Lebih dari itu, teori juga membantu para manajer pendidikan untuk merumuskan permasalahan dan atau hipotesis penelitian yang perlu dilakukan.

Rekomendasi

Rekomendasi berikut merupakan kesimpulan dan saran yang berikan melalui ulasan-ulasan dalam prosiding konferensi dan seminar internasional ini. Beberapa rekomendasi untuk perbaikan manajemen pendidikan ke depan yaitu: (1) Aspek kurikulum dan pembelajaran, yaitu perlu upaya menterjemahkan tujuan pendidikan nasional kita dan empat pilar pendidikan global ke dalam sosok kemampuan umum lulusan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Sosok kemampuan mana yang semestinya merupakan terjemahan “beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, “berakhlak mulia” dan atau pilar *learning to be*, sosok kemampuan mana yang merupakan terjemahan tujuan pendidikan nasional “berilmu” dan atau pilar *learning to know*, sosok mana yang merupakan terjemahan “sehat, cakap, kreatif, mandiri” dan atau pilar *learning to do*, begitu juga untuk tujuan “demokratis dan bertanggungjawab” dan atau pilar *learning to live together*, dan seterusnya untuk masing-masing jenis dan jenjang pendidikan. Hasil rumusan terjemahan/jabaran tujuan pendidikan pendidikan nasional ini menjadi dasar perumusan kompetensi umum tiap bidang studi untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan (Hendyat Soetopo: 2012);

(2) Pelaksanaan MBS perlu dilakukan optimalisasi terus menerus. Ansar (2012) menegaskan bahwa untuk keberhasilan implementasi MBS, harus dikembangkan paradigma berpikir antara lain; menghapus orientasi berpikir ke atas, ke pusat, dan sikap menunggu, mengembangkan sikap mental antisipatif dan inisiatif, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, hambatan-hambatan, dan potensi yang dimiliki; membangun kemampuan memenuhi kebutuhan, dan mengatasi hambatan, membangun kemampuan mengelola potensi, membangun kualitas guru secara individual, membangun dan mengembangkan metode baru dalam menilai dan menggolongkan-golongkan siswa, serta membangun komunitas sekolah sebagai wadah belajar bersama. Hal ini membutuhkan komitmen penuh dari seluruh *stakeholders*.

(3) Berkaitan dengan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, Nurul Ulfatin (2012) memberikan rekomendasi bahwa penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia beberapa tahun yang lalu ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan, program, dan kegiatan yang konkrit. Satu kegiatan konkrit dan dinilai sangat efektif adalah didirikannya SMP Satu Atap di sejumlah daerah pedesaan dan daerah terpencil. SMP Satu Atap memiliki karakteristik yang sangat khusus yang berbeda dengan SMP reguler. Untuk itu, manajemen yang diterapkan di SMP Satu Atap seharusnya dirancang secara khusus. Kekhususan yang diperlukan antara lain layanan kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal yang diperlukan di SMP Satu Atap adalah kurikulum atau program yang membelajarkan siswa untuk mencapai kompetensi *pra-vocational skills* dengan jenis pengalaman belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa dan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil.

(4) Dengan disparitas mutu pendidikan antar propinsi/kabupaten/kota, kiranya *twinning program* bisa menjadi alternatif untuk mengakselerasi pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Penerapan *twinning program* di sekolah-sekolah Indonesia khususnya ditujukan untuk pencapaian standar nasional pendidikan atau standar yang lebih unggul. Untuk hasil terbaik, dalam pemilihan partner dan prosesnya perlu memperhatikan berbagai aspek, baik dari sisi mitra sekolah, desain kemitraan, pihak-pihak yang terlibat, program/aktivitas yang dilakukan, parameter, dan monitoring.

Twinning program adalah tentang aktivitas mentransfer pengetahuan operasional yang relevan di antara dua lembaga. Kegiatan *twinning program* di sekolah akan lebih baik bila dimaknai sebagai proyek bersama, dan bukan sekedar program salah satu pihak. Diperlukan dukungan individu-individu di sekolah dalam Kemitraan sekolah melalui *twinning project* baik dari sisi pemahaman dan keterlibatan. Implementasi *twinning project*

pada sekolah dapat membuat sekolah belajar banyak, namun perlu diperhatikan bahwa yang memulai perubahan adalah individu-individu yang belajar. Untuk itu perlu penyatuan pandangan antara individu untuk menuangkan hasil belajarnya agar menjadi hasil belajar kolektif/organisasi.

(5) Pada aspek kepala sekolah, Karwanto (2012) menyarankan: Pola rekrutmen dan pengangkatan kepala sekolah yang berlaku saat ini perlu perubahan manajemen dan regulasi untuk memperbaikinya; Dalam proses pengangkatan kepala sekolah, seseorang harus menjalani pelatihan (*training*) dengan minimal waktu yang ditentukan; Perlu pembinaan terhadap kepala sekolah secara profesional dan berkesinambungan; Penunjukkan kepala sekolah perlu memperhatikan lima kompetensi sesuai Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010; dan dalam upaya pengembangan keterampilan manajerial kepala sekolah perlu disusun *road map* kepala sekolah profesional antara lain: (a) terpenuhinya standar kompetensi kepala sekolah; (b) pengembangan silabus dan kurikulum pelatihan kepala sekolah; (c) pengembangan bahan ajar peningkatan kompetensi; (d) pelaksanaan TOT *Master Trainer* untuk memperkuat pelatihan kepala sekolah; (e) pengembangan tes kompetensi dan *mapping* kompetensi kepala sekolah; (f) kemitraan kepala sekolah; (g) pengembangan sistem penilaian kinerja kepala sekolah; (h) pengembangan pedoman seleksi dan rekrutmen calon kepala sekolah; (i) *mapping* kinerja kepala sekolah; (j) pengembangan kebijakan lisensi kepala sekolah; (k) pengembangan kebijakan CPD kepala sekolah; (l) pengembangan sistem karier kepala sekolah; (m) pengembangan *training* reguler untuk kepala sekolah; (n) kerjasama internasional dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah; (o) pemberdayaan organisasi MKKS (SMA)/KKKS (SD/SMP); (p) pemberdayaan organisasi profesi kepala sekolah; (q) forum *best practice* kepala sekolah; dan (t) penghargaan kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi (Dharma, 2009).

(6) Pelatihan atau pendidikan dan pelatihan semestinya memberikan dampak terhadap oerbaikan mutu kinerja pendidik dan tenaga pendidikan. Sultoni (2012) memberikan rekomendasi bahwa cara menarik perhatian peserta pelatihan (*attention*) antara lain pernyataan dramatis, atraksi, musik, film. Cara menghubungkan materi pelatihan dengan materi yang telah diketahui peserta pelatihan (*perception*) antara lain pertanyaan terbuka, mengulas kejadian hangat, metode canthol diawali *relaxation*. Cara mengulang materi pelatihan (*rehearsal*) antara lain mengulang menggunakan suara, mengulang dalam hati, mengulang sambil beraktivitas. Cara melakukan pengkodean (*encoding*) agar materi pelatihan masuk dan tersimpan dalam memori jangka panjang antara lain metode rangkai, metode lokasi, metode akronim. Cara memanggil kembali materi pelatihan yang telah

dimasukkan agar menancap dalam memori jangka panjang (*retrieval*) adalah dengan carai dipanggil (diingat) secara periodik: 24 jam setelah pelatihan usai, 1 minggu setelah pelatihan, 2 minggu setelah pelatihan, 1 bulan setelah pelatihan, 6 bulan setelah pelatihan. Selanjutnya setiap 6 bulan sekali. Cara meningkatkan kesadaran (*meta cognition*) peserta pelatihan antara lain “ambak” dan “arub” yang disertai atraksi untuk menancapkannya ke dalam memori peserta pelatihan.

(7) Fenomena konflik di sekolah terus terjadi, maka dibutuhkan manajemen konflik dalam dunia pendidikan. Ahmad Nuradabi (2012) memberikan rekomendasi bahwa manajemen konflik di sekolah harus dikembangkan dan dioptimalkan proses pelaksanaannya, agar sekolah bisa berkembang dan dinamis ketika konflik yang ada bisa dikendalikan dengan sempurna. Pengembangan pelaksanaan manajemen konflik bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan dilakukannya pembinaan dan pelatihan oleh Kemdikbud kepada kepala-kepala. Harapannya bahwa peningkatan manajemen pendidikan khususnya manajemen konflik perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik, dengan jalan menerapkan teori-teori manajemen konflik yang sesuai dengan kondisi lembaga serta peran serta dari pemerintah agar lebih dioptimalkan lagi.

(8) Rambat Nur Sasongko (2012) memberikan rekomenasi yang menarik terhadap fenomena sekolah miskin. Bahwa manajemen sekolah yang baik salah satunya ditentukan oleh pengetahuan kepala sekolah tentang hal tersebut (Gramage, 2008). Hasil penelitian yang menunjukkan pengetahuan kepala sekolah terhadap bidang manajemen amat kurang akan memberikan kontribusi yang positif terhadap sekolah miskin. Sesungguhnya mutu pendidikan dari suatu sekolah tergantung dari praktik manajemen pendidikan di sekolah tersebut (Bush and Bell, 2002). Penyelenggaraan sekolah yang mengelola bidang kurikulum, personalia, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat turut menentukan mutu sekolah (Sasongko, 2008). Manajemen pendidikan yang dikelola dengan memenuhi standar yang baik, maka akan menghasilkan mutu sekolah yang baik pula. Kondisi ini dapat diwujudkan bila manajer pendidikan di sekolah tersebut yakni kepala sekolah memiliki visi dan inovasi ke arah peningkatan mutu sekolah. Tanpa visi dan inovasi, sekolah kurang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perbaikan mutu pendidikan. Demikian pula sebaliknya, manajer sekolah yang kurang memiliki visi dan inovasi akan memberikan dampak terhadap pembentukan sekolah miskin; dan

(9)Terkait dengan pengembangan jurusan administrasi dan manajemen pendidikan, maka menurut Mada Sutapa dan Dwi Esti Andriani (2012) penyusunan kurikulum dengan pendekatan kompetensi tersebut didasarkan pada kebijakan pemerintah yang mengeluarkan

Kurikulum Berbasis Kompetensi. Adapun kompetensi (kemampuan-kecakapan-keahlian) Program Studi Manajemen Pendidikan mencakup pemilikan kemampuan-kecakapan-keahlian dalam: (a) Wawasan filsafat dan teori pendidikan yang melandasi pengelolaan (manajemen) pendidikan; (b) Penghayatan nilai-nilai kepribadian dan profesionalitas menajerial pendidikan; (c) Wawasan dinamika sistem dan penyelenggaraan pendidikan nasional dan global; (d) Pengelolaan atau manajemen (perencanaan, pengaturan, evaluasi) aspek/komponen sistem pendidikan dan lembaga penyelenggara pendidikan, serta penyelenggaraan proses khas pengelolaan (manajemen) pendidikan; dan (e) Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan.

Daftar Rujukan

- Artikel yang termuat dalam prosiding ini dijadikan acuan utama
Jawa Pos, 15 Juni 2011. M.Nuh: Nyontek Masal Tak Terbukti Kesimpulan Mendiknas Dinilai Keliru.
Jawa Pos. 6 Juni 2011. *Audit Tidak Mendidik Kementerian Pendidikan*. Halaman 4 Kolom Jadi Diri.
Jenkins, P.J. 2010. *Memupuk dan Mengembangkan Nilai-Nilai Spiritual pada Anak*. Jakarta: Gramedia.
Kompas, Rabu 4 Mei 2011
Maisyaroh dan Surjani. 2004. *Manajemen Personalial*. Makalah disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Manajemen sekolah bagi Kepala Sekolah Dasar Se Indonesia di Malang, Juli – Agustus 2004.
Maisyaroh,dkk (editor). 2004. *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: Universitas Negeri Malang.
Siami dan Kejujuran. Tajuk Rencana Kompas Tanggal 15 Juni 2011.
Triwiyanto,T dan Sobri.A.Y. 2010. *Panduan Mengelola Sekolah Bertaraf Internasional*. Yogyakarta: Arruz-Media.
Ulfatin, N & Arifin. I. 2004. *Manajemen Pembelajaran Di Sekolah Dasar : Strategi Pembelajaran Model Belajar Mandiri Berbasis PAKEM*. Makalah disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Manajemen sekolah bagi Kepala Sekolah Dasar Se Indonesia di Malang, Juli – Agustus 2004.